



Peran Audit Publik Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Pemerintah: Suatu Tinjauan Literatur

Naufan Fadhil¹, Trinandari Prasetya Nugrahanti²

^{1,2} Perbanas Institute Jakarta

Korespondensi Penulis : naufanfadhil20@gmail.com

Abstract. *The accountable management of public sector finances is one of the key elements in realizing the principles of good governance. Public auditing serves as a supervisory mechanism aimed at assessing compliance, fairness, and performance in the management of a country's public finances. This study aims to analyze the role of public auditing in promoting accountability in public sector financial management. The research employs a descriptive qualitative approach through a literature review by collecting sources from academic journals, official documents related to public auditing, and relevant laws and regulations concerning financial accountability and public auditing. The study examines how public auditing contributes to accountability in financial management. The results indicate that public sector auditing plays a significant role in enhancing transparency, improving the quality of financial reporting, increasing the efficiency and effectiveness of government financial management, and strengthening oversight of government programs. Therefore, public auditing does not merely function as an inspection instrument, but also as a mechanism for strengthening accountability and as a crucial factor in increasing public trust in public sector finances.*

Keywords : *Public Audit; Accountability; Public Sector Finance; Good Governance*

Abstrak. Pengelolaan keuangan sektor public secara akuntabel jadi salah satu hal yang utama dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Audit public juga sebagai mekanisme pengawasan yang memiliki tujuan dalam hal menilai kepatuhan, kewajaran serta kinerja dari pengelolaan keuangan dalam suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit publik dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur, dengan mengumpulkan sumber-sumber dari jurnal ilmiah, dokumen resmi terkait audit publik, peraturan perundang-undangan. Tentunya yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dan audit publik. Studi ini melihat bagaimana audit publik berkontribusi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit sektor publik berperan dalam peningkatan transparansi, perbaikan kualitas pelaporan keuangan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintahan sampai pengawasan program pemerintah. Oleh sebab itu, audit public tidak hanya bereperan sebagai instrument pemeriksaan, tetapi sebagai mekanisme penguatan akuntabilitas, serta menjadi poin penting dalam meningkatkan kepercayaan public pada keuangan sektor public.

Kata Kunci: Audit Publik, Akuntabilitas, Keuangan Sektor Publik, Good Governance

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan meningkatkannya partisipasi Masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah kini dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang mereka lakukan secara terbuka dan berorientasi pada hasil. Prinsip yang ada pada *good governance*, menempatkan akuntabilitas public sebagai focus utama dalam tata Kelola sektor public. Namun pada kenyataannya pengelolaan keuangan negara masih menghadapi berbagai permasalahan. Temuan audit yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa adanya kelemahan pada sektor pengendalian Internal, tidak patuh pada undang-undang, serta kurangnya efisiensi dalam pengelolaan pada sejumlah pemerintah daerah. Selain itu, fenomena

audi expectation gap di sektor public Indonesia menunjukkan terdapat kesenjangan yang terjadi antar persepsi masyarakat terhadap peran auditor yang sesungguhnya.

Permasalahan selanjutnya Adalah belum optimalnya koordinasi yang dilakukan antara auditor internal dan eksternal dalam praktik pengawasan keuangan negara. Faktor kompetensi, independensi, serta dukungan kelembagaan menjadi factor penentu kualitas audit internal. Meskipun audit public telah memiliki dasar hukum melalui undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tetnang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada praktiknya masih menghadapi tantangan structural dan operasional. Peran BPK sebagai auditor yang ditunjuk sesuai undang-undang harus juga meyakinkan public atas informasi laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Termasuk penyajian informasi yang indepeden dan professional. Di Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara, harus dilakukan secara tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan untuk mewujudkannya, harus ada standar yang dilakukan BPK yang bebas dan mandiri.

Opini audit seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sering dijadikan indicator dalam menilai suatu keberhasilan pengelolaan keuangan. Namun, tidak sedikit juga kasus menunjukkan opini tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tata Kelola yang terbebas dari permasalahan substantif. Masalah ini menimbulkan pertanyaan dikalangan public apakah audit public dapat berkontribusi kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan pada sekotr public, bukan hanya sebagai formalitas saja. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, istilah yang sering dipakai untuk audit sektor publik adalah pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Proses pemeriksaan ini dilakukan secara independent, objektif dan professional, berdasarkan kebenaran, kredibilitas, kecermatan disertai informasi yang valid tentang pengelolaan keuangan negara. Di Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa wewenang yang melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk ruang lingkup audit Adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Penelitian lanjutan oleh Raditya *dkk.* (2022) menunjukkan bahwa opini audit dapat memengaruhi hubungan antara kemandirian keuangan dan ukuran legislatif dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kualitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari seberapa cepat pemerintah mengadopsi *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara, harus memiliki unsur akuntabilitas,

profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan dan pemeriksaan yang dilakukan secara bebas dan mandiri. Oleh karena itu, masyarakat bisa andil dalam mengawasi kebijakan publik yang dimasa akan datang dan dapat memberi manfaat untuk semua orang, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, guna mencegah manipulasi (Arifani et al., 2018). Pengertian audit menurut Bastian (2007) adalah suatu proses sistematis dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan (assertion) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis, praktis, dan kebijakan dalam penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur mengenai peran audit publik sebagai mekanisme pengawasan dalam kerangka akuntabilitas sektor publik dan teori keagenan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan serta tindak lanjut rekomendasi audit. Dari sisi kebijakan, temuan ini mendukung perumusan regulasi pengawasan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus membuka peluang penelitian empiris lanjutan terkait kualitas audit dan tata kelola pemerintahan.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci utama bagi terwujudnya good corporate governance. Akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan disclosure atas seluruh kegiatan/program dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut yang dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik (Mahsun, 2006: 83). Pengelolaan yang baik di sektor publik, menjadi hal penting dalam membangun perekonomian. Selain itu tata kelola yang dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang inovatif guna mengefisienkan sektor publik yang akhirnya dapat mewujudkan komitmen ke Masyarakat. Tata kelola yang dapat dipertanggung jawabkan, biasanya akan memperhatikan akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan publik. Sehingga bisa menimbulkan juga investasi jangka Panjang dan meningkatkan integritas suatu daerah. Menurut (Kalangi, 2012), agar pengelolaan dana Masyarakat dilakukan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel, beliau menyarankan konsep *value for money*, sebagai tanda akuntabilitas publik.

Konsep value for money diantaranya, efektivitas pelayanan public, meningkatkan mutu pelayanan, menggunakan sumber daya secara optimal, alokasi belanja berorientasi untuk kepentingan public dan meningkatkan pemahaman aparaturnegara dalam penerapan dan kegiatan untuk pelayanan public.

Dalam PP Nomor 29 Tahun 2010 . Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Dalam birokrasi, instansi pemerintahan harus mengikuti arahan dari pimpinan tertingginya. Sistem bisa berjalan baik jika antara atasan dan pelaksana mengerti tugasnya masing-masing, Ketika perintah dari atasan harus dijalankan dengan baik, tanpa banyak pertanyaan berulang. Tentunya harus diiringi dengan aturan kerja dan penilaian kerja yang sudah ditetapkan. Maka pendekatan ini akuntabilitas dalam sektor public dapat diwujudkan melalui aturan administrasi dan pengawasan anggaran yang jelas. Pada Peraturan BPK RI No 01 Tahun 2007, akuntabilitas diperlukan agar dapat mengetahui program yang sudah dijalankan yang dibiayai negara, tingkat kepatuhannya sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Termasuk kehematan, efisiensi dan efektivitas program tersebut.

Transparansi

Menurut Nugrahanti (2023), transparansi pelaporan keuangan sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai kesehatan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur ke public, didasarkan atas pertanggung jawaban pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya yang dititipkan kepadanya dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Di PP Nomor 20 tahun 2010 juga dijelaskan tentang tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, termasuk diantaranya Masyarakat umum. Dengan menyertakan informasi tentang sumber alokasi pendanaan, informasi kesanggupan pembiayaan pengeluaran, informasi entitas dalam mendanai kegiatan melalui kasnya, dan posisi keuangan. Didalam PP Nomor 71 Tahun 2010, juga dijelaskan bahwa informasi dalam laporan keuangan juga harus memiliki keandalan. Keandalan yang dimaksud adalah memberikan informasi yang terbebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan saji, memberikan setiap fakta secara jujur dan dapat dipertanggung-jawabkan. Informasi yang tidak relevan dan tidak dapat diandalkan, berpotensi dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu penyajian yang jujur, dapat diverifikasi dan mengandung unsur netralitas.

Audit Sektor Publik

Auditing sektor publik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan keuangan pada organisasi sektor publik (Mahmudi, 2016). Menurut Peraturan BPK RI No 01 Tahun 2007, Pemeriksaan (Auditing) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa bertanggung jawab pada pelaksanaan pemeriksaan secara independen, objektif dan profesional, sesuai aturan yang berlaku. Wajib merencanakan dan melaksanakan proses audit secara cermat, agar mendapat bukti yang cukup dan tepat, sebagai dasar hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga harus jujur, jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan, agar tetap menjaga integritas dan kompetensi demi menjaga kepercayaan publik.

Menurut Malan (1984), audit pemerintahan (sektor publik) terdiri dari tiga hal utama. Yang pertama *Financial and Compliance*. Bertujuan untuk memeriksa apakah pelaksanaan keuangan dapat berjalan dengan baik, apakah sudah sesuai aturan dan sudah disajikan dengan wajar. Kedua, *Economy and Efficiency*. Yaitu, untuk mengetahui apakah entitas dapat mengelola sumber yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang didalamnya ada sistem informasi manajemen, prosedur administrasi dan struktur organisasi yang jelas. Ketiga, Program Results. Menentukan apakah hasil yang sudah ada, telah dicapai pada biaya yang rendah.

Dalam Peraturan BPK RI No 01 Tahun 2007 juga memuat 3 (Tiga) jenis pemeriksaan (Audit). Terdiri dari Audit Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksa yang diberi tugas, harus juga memahami tentang akuntansi dan auditing, memahami prinsip akuntansi yang berlaku, yang berkaitan dengan yang diperiksa. Selanjutnya Audit Kinerja, pemeriksaan ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Dalam pemeriksaan ini pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan, serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu protam dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggung-jawabn public. Yang terakhir, Audit Dengan Tujuan Tertentu. Bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bersifat, eksaminasi, reuiu atau prosedur yang disepakati. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review. Teknik penelitian ini mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi dan mensintesis hasil penelitian terdahulu. Ramdhani et al., (2014) menjelaskan ada empat tahapan dalam membuat literature review, yaitu memilih topik yang akan diriview, melacak dan memilih artikel yang relevan, melakukan analisis dan sintesis literatur, serta mengorganisasi penulisan review.

Literature review diterapkan melalui lima tahap berikut ini:

Tahap	Deskripsi
1. Penentuan Kata Kunci Pencarian	Audit sektor public Audit internal pemerintah Akuntabilitas keuangan public Good governance Pengendalian internal sektor public
2. Penelusuran Literatur	Google scholar Garuda Jurnal nasional terakreditasi SINTA Jurnal internasional bereputasi
3. Seleksi Artikel	Artikel yang membahas audit sektor public atau internal pemerintah Artikel yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi atau good governance Dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Relevan dengan sektor audit public.
4. Ekstraksi & Analisis Data	Teknik analisis data dalam penelitian ini Adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif metode analisis tematik. Analisis dilakukan dengan membaca dan memahami 15 artikel yang telah peneliti pilih. Kemudian, peneliti mengidentifikasi tujuan penelitian, metode yang digunakan, variable yang dikaji, serta hasil dan kesimpulan utama

	dari masing-masing penelitian. Dengan focus utama pada peran audit public dalam peningkatan transparansi, audit dan pencegahan fraud, kualitas audit dan akuntabilitas laporan keuangan, tantangan kelembagaan dan factor politiknya.
5. Validasi & Sistesis Temuan	Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan: Triangulasi sumber, membandingkan hasil dari berbagai jurnal yang sudah dipilih. Memakai artikel jurnal yang sudah terakreditasi untuk memastikan kualitas referensi yang digunakan. Analisis dilakukan terstruktur pada artikel yang ditelaah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menjalankan literatur untuk menganalisis sebanyak 15 jurnal.

No	Judul & Tahun	Indeks Jurnal (disematkan)	Jumlah Sitasi	Tujuan Penelitian	Hasil/Kesimpulan
1	Data Analytics in Fraud Prevention and Detection by Government Internal Supervisory Apparatuses at Ministries/Institutions/Local Governments: A Mixed-Method Study (Sidauruk, 2024)	Asia Pacific Fraud Journal – SINTA 3	3	Menganalisis penggunaan data analytics oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)	Data analytics meningkatkan deteksi fraud.
2	Good Governance and Corruption in Local Governments: The Role of Internal Control and Audit (Shidqi Farhan et al., 2025)	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia - Sinta 2	8	Mengkaji audit internal terhadap korupsi.	Internal control reduksi korupsi.
3	Mapping of Internal Audit Quality on the	Jurnal Economia - Sinta 2	11	Menjelaskan kualitas audit internal sektor	Sebagian besar audit internal fokus pada output

	Public Sector in Indonesia: A Systematic Review (Ranto Partomuan, 2023)			publik di Indonesia.	compliance; kompetensi & independensi dominan
4	How Audit Commitee Address The Effects Of Political Connection and Government Ownership in Banking Sector (Rini Dwiyuna et al., 2023)	Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan - Sinta 2	0	Menguji pengaruh political connections, government ownership, change in loans terhadap financial performance dan peran audit committee sebagai moderator	Political connections dan perubahan kredit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank, sementara kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh, dan komite audit memoderasi hubungan tersebut.
5	Auditor Professionalism and Fraud Prevention: Implications for Good Government Governance (Kurnia Sari et al., 2025)	Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan (JIMKES) - Sinta 2	0	Mengetahui bagaimana forensic audit, investigative audit, dan profesionalisme auditor memengaruhi pencegahan fraud dan bagaimana pencegahan fraud itu pada gilirannya berkontribusi pada good government governance.	Penerapan audit forensik, audit investigatif, dan profesionalisme auditor yang baik mampu meningkatkan pencegahan fraud, yang selanjutnya berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya good government governance.
6	Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah: Evaluasi Penerapan Audit Kinerja (Hesti et al., 2024)	Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi - Sinta 3	1	Untuk mengevaluasi dan menganalisis penerapan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern	Meskipun semua tahapan audit kinerja dilaksanakan oleh APIP, pelaksanaan tersebut masih belum sepenuhnya optimal sesuai

				Pemerintah (APIP), khususnya menilai kesesuaian pelaksanaan setiap tahapan audit kinerja (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan/komunikasi hasil) dengan pedoman audit kinerja yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.	dengan pedoman yang ada.
7	Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Fraud pada Sektor Pemerintahan (Arsyadona et al., 2025)	Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi	3	Menganalisis peran auditor internal pemerintah dalam memitigasi risiko fraud di sektor pemerintahan.	Auditor internal pemerintah berperan penting dalam mitigasi risiko fraud melalui deteksi kelemahan pengendalian internal, pencegahan dini kecurangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang efektivitasnya diperkuat oleh kepemimpinan kuat, kesadaran risiko fraud, dan dukungan teknologi seperti Whistleblowing System (WBS).
8	Challenges of Internal Auditing in the Indonesian Government	JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) - Sinta 2	3	Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan	Audit internal di lingkungan pemerintahan Indonesia memiliki peran penting

	(Mirna Amirya, 2025)			(challenges) yang dialami dalam pelaksanaan audit internal di pemerintahan Indonesia	dalam memastikan tata kelola yang baik (good governance), namun efektivitasnya masih terbatas oleh berbagai tantangan operasional, kelembagaan, dan sumber daya.
9	A Systematic Review of Public Sector Audits in Indonesia (Nia P et al., 2024)	Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara - Sinta 2	13	Memberikan tinjauan komprehensif terhadap literatur penelitian audit sektor publik di Indonesia.	Penelitian tentang audit sektor publik di Indonesia masih berkembang (nascent) dan memiliki ruang yang sangat luas untuk dikembangkan.
10	The Alignment of Internal and External Audit Agencies in Administering Public Sector Audits in Indonesia (Ahmad Yani et al., 2024)	Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)	2	Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja serta pola koordinasi antara lembaga pengawas internal dan eksternal dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara di Indonesia, serta merumuskan desain sinkronisasi (alignment) yang ideal antara kedua lembaga tersebut dalam pelaksanaan audit sektor publik.	Pengawasan pengelolaan keuangan negara oleh lembaga audit internal dan eksternal di Indonesia belum terintegrasi secara optimal karena belum adanya pengaturan koordinasi yang komprehensif.
11	Determinants of Government	Berkala Akuntansi	0	Menganalisis faktor-faktor	Kualitas audit internal sektor

	Internal Audit Quality (Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Internal Pemerintah) (Laurenza Sitorus et al., 2025)	dan Keuangan Indonesia - Sinta 3		yang memengaruhi kualitas audit internal pada kantor perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.	publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi auditor, independensi auditor, dan kepemimpinan.
12	An Investigation of Audit Expectation Gap in Indonesia's Public Sector (AJ Pramono et al., 2022)	Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara - Sinta 2	1	Menyelidiki audit expectation gap di sektor publik Indonesia.	Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan ekspektasi audit di sektor publik Indonesia, terutama antara auditor dan pengguna tidak berpengalaman, akibat miskonsepsi tentang tanggung jawab auditor dan arti opini wajar. Informasi tambahan dalam laporan audit membantu, namun tidak cukup menutup kesenjangan, sehingga diperlukan kombinasi pendekatan lain atau perluasan tanggung jawab auditor. Penelitian ini terbatas karena sampel kecil dan kuesioner yang diadaptasi dari sektor privat.
13	Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah Dalam Mitigasi Risiko Fraud Pada Sektor	Journal of Economic, Business and Accounting (Costing)	4	Untuk menganalisis peran auditor internal pemerintah dalam	Auditor internal pemerintah berperan penting dalam mitigasi risiko fraud melalui penguatan

	Pemerintahan. (Yanie et al., 2024)			memitigasi risiko kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan.	pengendalian internal, deteksi dini kecurangan, penerapan whistleblowing system, serta dukungan kepemimpinan dan budaya organisasi yang baik. Peran auditor internal efektif dalam mengurangi risiko fraud di sektor pemerintahan apabila didukung sistem pengendalian yang kuat, independensi auditor, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan.
14	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Audit Internal Sektor Publik(Sinta Septriana et al., 2025)	Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi - Sinta 5	0	Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit, profesionalisme auditor, dan hubungan antara auditor internal- eksternal terhadap efektivitas fungsi audit internal sektor publik, dengan dukungan manajemen sebagai variabel moderasi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor serta hubungan antara auditor internal dan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas fungsi audit internal sektor publik, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan. Dukungan manajemen terbukti memperkuat pengaruh profesionalisme auditor terhadap efektivitas audit

					internal, namun tidak memperkuat pengaruh kualitas audit maupun hubungan antar auditor terhadap efektivitas tersebut.
15	Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik (Putri Nabila et al., 2025)	Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita (JAMANTA)	7	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan terwujudnya good governance di sektor publik melalui tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Penelitian menemukan bahwa penguatan akuntabilitas dalam berbagai dimensi pengelolaan keuangan publik berdampak langsung pada peningkatan transparansi fiskal, integritas kelembagaan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga akuntabilitas bukan hanya menjadi indikator good governance tetapi juga pilar strategis dalam reformasi tata kelola sektor publik menuju praktik good governance yang berkelanjutan.

Audit Sektor Publik dan Pencegahan Fraud

Pencegahan Fraud menjadi salah satu hal yang banyak dibahas jurnal-jurnal yang ada ditabulasi. Penelitian pada *Data Analyst in Fraud Prevention and Detection* (Sidauruk, 2024) , menjelaskan pentingnya transformasi audit berbasis teknologi dalam mendeteksi cara-cara kecurangan yang sistematis. Temuan ini diperkuat oleh penelitian *Auditor Professionalism and Fraud Prevention* (Kurnia Sari et al., 2025), yang menyatakan profesionalisme seorang auditor memiliki pengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud. Meskipun teknologi juga berpengaruh, factor keandalan manusia (auditor) juga memiliki pengaruh penting. Kompetensi, skeptisme profesional, serta integritas auditor menjadi factor penting untuk memastikan

bahwa temuan audit benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan Selanjutnya, jurnal *Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Mitigasi Fraud* (Arsyadona et al., 2025), menyampaikan bahwa auditor internal Pemerintah berfungsi sebagai risk mitigator, yaitu pihak yang membantu mengurangi kemungkinan atau dampak dari suatu risiko. Di penelitian ini pun menunjukkan bahwa auditor tidak hanya mendeteksi kesalahan, tetapi harus juga potensi resiko yang muncul saat terjadi sebuah penyimpangan. Peran ini juga yang membuat seorang auditor bukan hanya sekedar pengawas, tapi juga bagian dari system manajemen dalam hal risiko organisasi.

Penelitian *Audit Expection Gap in the Public Sector* (AJ Pramono et al., 2022), menambahkan. Adanya kesenjangan antara harapan public dengan auditor dalam memberantas hal-hal yang bersifat penyelewengan. Hal ini menjadi indicator bahwa pencegahan fraud tidak hanya tentang teknis saja, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi dan persepsi public. Ketika ekspektasi public terlalu tinggi tanpa pemahaman fungsi audit, maka public menilai bahwa kinerja auditor kurang optimal.

Sementara itu , penelitian *Challenges of internal Auditing in the Indonesian Public Sector* (Mirna Amirya, 2025) menyampaikan bahwa banyak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan efektivitas pencegahan fraud, yaitu keterbatasan sumber daya, tekanan birokrasi, intervensi manajerial, serta kurangnya dukungan dari pimpinan. Ini menjadi tanda bahwa efektivitas audit bergantung pada lingkungan auditor tempat bekerja. Jika dikaitkan dengan jurnal-jurnal yang ada dalam tabulasi yang membahas kualitas audit dan tata Kelola, pencegahan fraud juga berkorelasi dengan independensi auditor dan koordinasi dari pengawasan internal-eksternal. Ketika auditor memiliki posisi yang independen dan system pengendalian yang kuat, maka pencegahan fraud bisa dilakukan secara efektif. Dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pencegahan fraud, dapat disimpulkan bahwa pencegahan fraud pada sektor public dipengaruhi oleh tranformasi audit berbasis digital, profesionalisme auditor, intergritas auditor, persepsi public, kekuatan sistem pengendalian internal, koordinasi antar bagian dan dukungan kelembagaan.

Audit Internal sebagai Pilar Good Governance dan Reformasi Birokrasi

Berbagai jurnal yang ada ditabulasi membahas bagaimana audit internal merupakan komponen penting dalam implementasi *Good Governance*. Dalam penelitian *Good Governance in Local Government* (Shidqi Farhan et al., 2025) , menunjukkan hubungan yang penting antara audit internal dan penurunan korupsi. Penelitian pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa jika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik dapat membatasi penyalahgunaan

anggaran melalui pengawasan yang berkelanjutan. Artinya, audit internal mempunyai fungsi sebagai instrument yang menjaga integritas pengelolaan keuangan. Namun pada penelitian *Efektifitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas* (Nabila et al., 2025) mengembangkan temuan tersebut, bahwa audit kinerja tidak hanya menilai kepatuhan semata, tetapi juga mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan nilai ekonomi program pemerintah. Sehingga, audit berkontribusi pada kualitas belanja public, bukan hanya pada legalitasnya.

Penelitian *Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah* (Hesti et al., 2024), membahas tindak lanjut dari rekomendasi audit. Tanpa implementasi rekomendasi, audit hanya sekedar administrative saja. Pada penelitian ini, menunjukkan bahwa efektivitas audit tidak hanya pada proses pemeriksaan, namun sangat bergantung pada keseriusan manajemen dalam hal melakukan perbaikan. Kemudian penelitian *The Alignment of Internal and External Audit Activities* (Ahmad Yani et al., 2024), menyoroti pentingnya koordinasi antar auditor internal dan eksternal agar memerkuat transparansi serta mencegah duplikasi pemeriksaan. Koordinasi ini bisa meningkatkan efisiensi pengawasan dan memperluas jangkauan control terhadap aktivitas pengelolaan keuangan Negara. Sementara pada penelitian *A Systematic Review of Public Sector Audit in Indonesia* (Nia P et al., 2024), audit ditempatkan pada bagian reformasi birokrasi nasional. Audit digunakan sebagai mekanisme yang handal dalam hal memperbaiki tata Kelola, meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan public.

Jika dirangkum lebih dalam, audit internal mendukung good governance pada sektor public dalam hal peningkatan transparansi laporan keuangan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi, sinergi pengawasan internal dan eksternal, serta adanya dukungan terhadap reformasi birokrasi.

Kualitas Audit Internal: Dimensi Teknis, Organisasional, dan Sosial

Penelitian *Mapping of Internal Audit Quality on the Public Sector* (Ranto Partomuan, 2023) menyatakan bahwa audit sektor public masih berkuat pada aspek procedural, seperti kepatuhan pada aturan yang berlaku terkait audit. Penulis menekankan agar audit lebih menciptakan value bagi organisasi public. Sehingga, audit internal tidak hanya berfokus pada kepatuhan administrative, tetapi juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan tata Kelola. Hal ini juga diperjelas oleh penelitian *Determinants of Government Internal Audit Quality* (Laurenza Sitorus et al., 2025), bahwa independensi, kompetensi dan objektivitas merupakan factor yang mempengaruhi kualitas audit. Independensi membuat auditor menyampaikan sesuatu temuan tanpa adanya tekanan, kompetensi berpengaruh pada ketepatan analisis dan objektivitas menjaga integritas auditor.

Menurut Nugrahanti (2023), independensi auditor sangat penting karena untuk menjamin objektivitas dan ketidakberpihakan auditor dalam mengevaluasi informasi keuangan. Independensi yang terganggu, dapat mengurangi efektivitas fungsi audit dan kredibilitas pengendalian internal. Sejalan dengan itu, penelitian *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Audit Internal* (Sinta Septirana et al., 2025) juga menyatakan bahwa profesionalisme, pelatihan, serta pengalaman kerja bisa mempengaruhi efektivitas audit. Hal ini juga membuktikan bahwa kualitas audit menjadi investasi jangka Panjang organisasi dalam pengembangan kualitas SDM yang dimiliki. Namun kualitas audit tidak hanya pada aspek individual auditor. Beberapa penelitian yang ada di tabulasi ini juga menjelaskan bahwa dukungan manajemen dan struktur organisasi berperan penting dalam menentukan efektivitas fungsi audit. Tanpa dukungan dari pimpinan, rekomendasi yang dilakukan auditor justru tidak ada kepastian apakah ditindak lanjuti atau tidak. Lebih lanjut lagi, Ketika seorang auditor berada pada struktur organisasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, independensinya bisa terancam. Hal ini bisa mempengaruhi kebebasan auditor dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian *Audit Expectation Gap in The Public Sector* (AJ Pramono et al., 2022) menjelaskan dimensi sosial pada kualitas audit. Studi ini mengungkapkan kualitas audit tidak hanya berdasarkan standar profesional, persepsi publik juga berperan dalam menilai kontribusi auditor dalam memberantas penyimpangan dan korupsi. Ketika Masyarakat beranggapan auditor gagal memenuhi ekspektasi Masyarakat, pengakuan profesi audit dapat menurun. Meskipun auditor menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas audit sektor public perlu pendekatan yang komprehensif. Diantaranya, peningkatan dan pelatihan untuk auditor, penguatan independensi, perbaikan struktur pelaporan dan koordinasi pengawasan dan penguatan budaya integritas dalam kegiatan pemerintahan.

Faktor Politik, Struktur Kekuasaan dan Tantangan Kelembagaan.

Dimensi Politik dalam Audit Sektor Publik tidak bisa dipisahkan begitu saja. Karena audit tidak berjalan hanya pada kajian teknis. Audit public yang berada dalam lingkungan birokrasi dan kekuasaan sering dihadapkan pada sarat kepentingan. Sehingga independensi auditor seringkali diuji dalam praktiknya. Penelitian *How Audit Committee Address the Effects of Political Connections* (Rini Dwiyuna et al., 2023) menjelaskan koneksi politik bisa mempengaruhi kualitas dari pengawasan dan kebijakan organisasi. Penulis mengungkapkan bahwa entitas yang memiliki kedekatan politik memiliki resiko lebih tinggi karena lemahnya fungsi kontrol.

Selanjutnya, penelitian *Challenges of Internal Auditing in the Indonesian Public Government* (Mirna Amiry, 2025) membahas tekanan politik dan birokrasi menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan audit. Auditor sering kali menghadapi temuan masalah audit yang berkaitan dengan pejabat tertentu yang memiliki posisi strategis dalam organisasi. Sementara itu, penelitian *A Systematic Review of Public Sector Audits in Indonesia* (Nia P et al., 2024) menjelaskan bahwa audit public banyak dipengaruhi oleh perubahan regulasi dan reformasi pemerintah. Reformasi birokrasi, penguatan peran pemerintah daerah dan penguatan lembaga pengawasan berperan dalam membentuk praktik audit sektor public di Indonesia. Di sisi lain, interaksi antara kebijakan dan kepentingan politik juga mempengaruhi prioritas audit. Pergantian pimpinan seringkali mengalihkan focus pengawasan, akibatnya pelaksanaan audit menjadi kurang konsisten. Tidak hanya itu, budaya birokrasi yang belum menerapkan berbasis kinerja dan transparansi, hal ini juga menjadi hambatan. Audit hanya dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai hal yang dapat memperbaiki kinerja. Dengan demikian, penguatan audit sektor public membutuhkan perubahan dalam sistem kelembagaan yang lebih luas, mencakup pengautan independensi auditor, perlindungan auditor dari kepentingan agenda politik, peningkatan budaya integritas bagi organisasi dan penyelarasan aturan pengawasan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari 15 jurnal yang ada ditabulasi, serta literatur yang lain. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa audit sektor public mempunyai peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara, serta mewujudkan prinsip good governance.

A. Pertama, aspek pencegahan fraud, perkembangan audit berbasis teknologi mampu membantu efektivitas deteksi kecurangan. Sidauruk (2014) dalam *Data Analytics in Fraud Prevention and Detection* menyatakan bahwa penggunaan *data analytics* oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), mampu mengidentifikasi pola fraud secara lebih terorganisir. Namun demikian, teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Kurnia Sari et al., (2025) dalam *Auditor Professionalism and Fraud Prevention* menyatakan bahwa profesionalisme auditor, audit forensic dan audit investigative berpengaruh penting terhadap pencegahan fraud dan pada tahap akhir mendukung good governance. Selain itu, Arsyadona et al., (2025) menyatakan auditor internal pemerintah mempunyai peran dalam mitigasi resiko fraud melalui antipasti awal kekurangan pengendalian internal dan penguatan transparansi. Namun, Pramono et al., (2022), dalam *Audit Expection Gap in The Public Sector* mengidentifikasi adanya perbedaan antara ekepektasi public dengan tanggung jawab auditor, yang membuktikan bahwa persepsi sosial dapat

mempengaruhi fungsi audit. Di sisi lain, Amiryra (2025) mengungkapkan bahwa tantangan operasional, kelembagaan dan keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan dalam mewujudkan efektivitas audit internal di Indonesia.

- B. Kedua, dalam konteks *good governance*, audit internal berfungsi sebagai landasan utama penguatan tata Kelola. Shidqi Farhan et al. (2025), menyatakan bahwa internal control dan audit internal turut serta dalam mewujudkan penurunan Tingkat korupsi di pemerintahan daerah. Putri Nabila et al., (2025) menegaskan bahwa optimalisasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan public berdampak positif terhadap peningkatan transparansi fiskal, integritas kelembagaan dan kepercayaan public. Hesti et al., (2024) menekankan bahwa audit kinerja tidak akan berjalan dengan optimal kalau rekomendasi audit tidak ada tindak lanjut. Lebih lanjut, Ahmad Yani et al., (2024) menekankan keselarasan antara auditor internal dan eksternal agar pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan keuangan negara berjalan efektif dan terintegrasi.
- C. Ketiga, kualitas audit internal menjadi factor utama dalam efektivitas pengawasan. Partomuan (2023) dalam *Mapping of Internal Audit Quality* menegaskan bahwa audit sektor public di Indonesia lebih berfokus pada kepatuhan, sehingga perlu diarahkan pada penciptaan nilai tambah. Sitorus et al. (2025) menekankan bahwa kompetensi, independensi dan kepemimpinan dapat berpengaruh terhadap kualitas audit internal pemerintah. Sinta Septriana et al., (2025) juga menegaskan profesionalisme auditor dan hubungan antara eksternal-internal berdampak pada efektivitas audit, khususnya jika didukung oleh dukungan manajemen. Sehingga kualitas audit tidak terbatas pada aspek teknis, tetapi ada ditentukan juga oleh organisasi dan sosial.
- D. Keempat, factor politik dan tantangan kelembagaan berperan sebagai factor eksternal yang berpengaruh pada efektivitas audit sektor public. Dwiyuna et al., (2023) menyatakan bahwa *political connections* berkontribusi pada kualitas pengawasan dan kinerja keuangan, serta komite audit berfungsi sebagai variable moderasi. Amiryra (2025), menekankan bahwa tekanan politik bisa berpengaruh negative terhadap pelaksanaan audit. Pada saat yang sama, Nia P et al., (2024) juga menyimpulkan penelitian audit sektor public di Indonesia masih mengalami perkembangan dan sangat tergantung pada regulasi serta kepentingan reformasi birokrasi.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa audit sektor public berkontribusi dalam hal peningkatan transparansi dan kualitas laporan keuangan, peningkatan sistem pengendalian

internal, pencegahan dan mitigasi resiko fraud, efektifitas dan efisiensi belanja serta legitimasi dan kepercayaan public.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, studi selanjutnya perlu menguji secara empiris efektifitas audit berbasis teknologi dan penggunaan data analytics dalam pencegahan fraud, khususnya jika dikombinasikan dengan profesionalisme auditor. Penelitian juga penting untuk mengkaji audit expectation gap di sektor publik guna memahami perbedaan persepsi antara masyarakat dan auditor, termasuk implikasinya terhadap legitimasi lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, diperlukan pengembangan model kualitas audit internal yang mencakup faktor teknis, organisasi, dan politik. Studi longitudinal juga disarankan untuk menganalisis dampak audit terhadap transparansi fiskal, efektifitas belanja, dan peningkatan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amirya, M. (2025). Challenges of Internal Auditing in the Indonesian Government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)*, 9(2), 705–719. <https://doi.org/10.23887/jia.v9i2.84737>
- Arsyadona, A., & Wulandari, S. (2025). Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Fraud pada Sektor Pemerintahan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 223–238. <https://doi.org/10.61132/rimba.v3i1.1594>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Chairina, S. W., Sulhendri, Umiyati, Prasetyo, I., & Uniyawati, U. (2022). Masih Pentingkah Pemberian Opini Audit Laporan Keuangan? *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 4(2), 12–31.
- Dewi, K. S., Raharjo, P., & Minarni, S. (2025). Auditor Professionalism and Fraud Prevention: Implications for Good Government Governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 3541–3552. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3576>
- Dwiyuna, R., Indayani, I., & Yusmita, F. (2024). How Audit Committee Address the Effects of Political Connections and Government Ownership in Banking Sector. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 159–178. DOI:10.22219/jrak.v14i1.26422
- Genda, M., Yani, A., & Syafiin, R. A. (2024). The Alignment of Internal and External Audit Agencies in Administering Public Sector Audits in Indonesia. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 7(2), 151–166. <https://doi.org/10.35166/jipm.v7i2.52>
- Istianah, I., Sari, N. P., & Indriani, V. (2024). A Systematic Review of Public Sector Audits in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 33–54.
- Kristianto, G. B., & Putri, P. L. (2021). Analisis Pelaksanaan Audit terhadap Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sesuai Permendagri 79 tahun 2018 di Kabupaten Banyumas. *J-LEE: Journal of Law, Economics, and English*, 2(2), 91–102.
- Nabila, P., & Maulina, I. (2025). Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, 5(1).

- Nugrahanti, T. P., Sudarmanto, E., Andani, M., & Judijanto, L. (2023). The Effect of Audit Quality, Auditor Independence, and Financial Reporting Transparency on Internal Control Effectiveness: A Case Study of a Public Company in Indonesia. *West Science Accounting and Finance*, 1(3), 108–118.
- Pramono, A., Budhiyanto, R. B., & Setiawan, I. (2022). An Investigation of Audit Expectation Gap in Indonesia's Public Sector. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 1-21. DOI: 10.28986/jtaken.v8i1.674
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Septiana, S., Puspitasari, I., & Mulyadi. (2025). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Audit Internal Sektor Publik. *Jurnal Jembatan*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v10i1.209>
- Setianingsih, H., & Setyaningrum, D. (2025). Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah: Evaluasi Penerapan Audit Kinerja. *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2391>
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good Governance and Corruption in Local Governments: The Role of Internal Control and Audit. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>
- Sidauruk, D. L. (2024). Data Analytics in Fraud Prevention and Detection by Government Internal Supervisory Apparatuses at Ministries/Institutions/Local Governments: A Mixed-Method Study. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2), 241–260. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i2.340>
- Sihombing, R. P. (2023). Mapping of Internal Audit Quality on the Public Sector in Indonesia: A Systematic Review. *Jurnal Economia*, 19(1), 81–94. <https://doi.org/10.21831/economia.v19i1.38073>
- Sitorus, L., & Wibowo, P. (2025). Determinants of Government Internal Audit Quality (Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Internal Pemerintah). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 215–236. <https://doi.org/10.20473/baki.v10i2.74652>
- Sugianto, Y., Permana, A. S., & Suropto. (2024). Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Fraud pada Sektor Pemerintahan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 589–603.
- Yudhistira, F. (2024). Pengaruh Pengendalian Intern, Audit Internal, dan Komite Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (studi pada BUMD di Aceh). *Jurnal SIMEN*, 11(2), 9-17